

PERALIHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PROTOKOL NOTARIS SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

Oleh:

Febrina Harianto¹, Sudjito²

ABSTRACT

The authority to manage a notary protocol from another notary which has reached 15 years or more is held by the registrar of district court. The authority has expired along with the withdrawal of Law of Notary (Peraturan Jabatan Notaris) which has been replaced by the new Law of Notary (UU Jabatan Notaris). The authority to manage a notary protocol from another notary which has reached 25 years or more is held by the district surveillance council (majelis pengawasan daerah). But until today the registrar of the court district still accepts application to issued copy of certificate. Therefore the writer's focus is doing research based on this matter under the title "the transfer of authority to manage notary protocol after the New Law of Notary"

This research is using empirical methods, field research as main data and supporting the findings with literature and documents. Data from resource persons is included as primary data and literature and documents as secondary data.

The results of this research are: (1) Since there is no response from the Law and Human Rights ministry on to the letter issued by the registrar of district court Yogyakarta related to the transfers of authority to manage notary protocol and the demands of society to apply for the copy of certificate, therefore the copy of certificate issued by the registrar of the district court only functions as help for the society in need. (2) The copy certificate issued by the registrar of district court of Yogyakarta is not legal because the legal ground that give them the authority had been replaced by the New Law of Notary, therefore their authority has been withdrawn. (3) District Surveillance Council has the same duties and authorities as a notary in managing its own notary protocol such as maintain the notary protocol, grosse acte, copy of certificate and quotation of certificate. Limited means and infrastructure are the main obstacles for the district surveillance council to make a physical transfer of notary protocol in the Yogyakarta district of court. Therefore the district surveillance council in Yogyakarta has not been able to do its functions related to managerial of notary protocol.

Key Words: Notary Protocol, The District Surveillance Council

¹ Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum UGM

² Fakultas Hukum UGM

I. Latar Belakang Masalah

Pasal 66 *Op Het Ambt in Indonesie* (Stb.1860:3) biasanya disebut Peraturan Jabatan Notaris (selanjutnya disebut PJN), Protokol Notaris dari Notaris lain yang sudah berusia lebih dari 15 (lima belas) tahun, akan diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Panitera Pengadilan Negeri di tugaskan menyimpan semua minuta, register dan repertorium Notaris yang telah diserahkan itu. Panitera Pengadilan Negeri juga berwenang dan wajib melakukan segala sesuatu mengenai minuta- minuta, registerregister dan repertorium itu, sebagaimana wewenang dan kewajiban Notaris, seperti mengeluarkan salinan akta³. Bunyi dari Pasal 66 PJN adalah sebagai berikut⁴:

“Notaris yang baru diangkat itu wajib, baik sendiri maupun oleh kuasanya secara tertulis, untuk dalam waktu tiga bulan setelah ia memangku jabatannya, membawa ke kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya Notaris mempunyai tempat kedudukan, minuta, daftar dan repertorium, sebegitu jauh itu pada tanggal satu Januari dari tahun, pada waktu mana terjadi pengambi-alihannya, berumur lebih dari limabelas tahun.

Tentang pembawaan itu dibuat berita-acara dan ditandatangani oleh Notaris dan Panitera; dari berita-acara ini diberikan satu helai kepada setiap penanda tangan. Para Panitera Pengadilan Negeri ditugaskan untuk menyimpan semua minuta, daftar dan repertorium yang mereka ambil alih. Mereka berwenang dan wajib melakukan segala sesuatu mengenai itu, sebagaimana Notaris berwenang dan wajib melakukannya terhadap minuta, daftar dan repertorium mereka.”

Berbeda dengan PJN, dalam Pasal 63 ayat (5) UUJN ditentukan bahwa “Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawasan Daerah.”

Pada saat UUJN diundangkan, dalam Pasal 91 UUJN, menentukan sebagai berikut:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. *Reglemen Op Het Ambt in Indonesie* (Stb.1860:3), sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101;

³ R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 235.

⁴ Lumbang Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm. 332-333

2. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101; Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4. Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang sumpah/janji Jabatan Notaris.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan Pasal 91 UUDN, PUN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka kewenangan Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam hal pengelolaan Protokol Notaris juga telah berakhir.

Hasil Pra Penelitian bulan Agustus tahun 2009 di Pengadilan Negeri Yogyakarta diperoleh informasi bahwa, sejak berlakunya UUDN tahun 2004 sampai dengan sekarang tahun 2010, UUDN telah berjalan selama 6 (enam) tahun, namun tidak pernah terjadi peralihan fisik dari Protokol Notaris dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Majelis Pengawasan Daerah (MPD) kota Yogyakarta. Berdasarkan keterangan dari pihak Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta mereka sudah pernah mengirimkan surat kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Protokol Notaris yang tersimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tetapi tidak mendapat tanggapan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini menyebabkan apabila ada masyarakat yang mengajukan permohonan atas salinan akta, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta masih mengeluarkan salinan akta dengan alasan membantu masyarakat yang berkepentingan⁵. Disini dapat dilihat terjadi suatu kesalahan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang masih mengeluarkan produk berkaitan dengan Protokol Notaris, yang secara tegas sudah

⁵ Hasil Pra Penelitian, Agustus 2009, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

tidak merupakan wewenang dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Pada pertengahan tahun 2009 diberlakukan ketentuan baru atas dasar Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 (selanjutnya disebut SK KMA No. 144/2007) tentang keterbukaan informasi di Pengadilan, dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) SK KMA No. 144/2007 yang intinya adalah semua produk hukum di Pengadilan dapat diakses secara langsung oleh publik melalui petugas informasi dan dokumentasi, Pengadilan juga tidak mewajibkan pemohon untuk menyebutkan tujuan atau alasan mengajukan permohonan informasi yang secara tegas bersifat terbuka Pengadilan hanya membebani Pemohon dengan biaya fotokopi. Adanya SK KMA No. 144/2007 tersebut menyebabkan ketika ada permohonan atas salinan akta yang masuk ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang dilakukan oleh Pengadilan adalah mengambil minuta akta dan difotokopi kemudian diberikan cap legalisir yang menyatakan bahwa fotokopi sesuai dengan aslinya, kemudian ditanda tangani oleh Ketua Kepaniteraan⁶.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa setelah berlakunya UUJN, Pengadilan Negeri Yogyakarta masih mengeluarkan salinan akta?
2. Apakah salinan akta yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta setelah berlakunya UUJN sah menurut hukum?
3. Bagaimana tugas dan wewenang MPD berkaitan dengan pengelolaan Protokol Notaris?

III. Metode Penelitian

Penelitian mengenai Peralihan Kewenang Pengelolaan Protokol Notaris. Setelah Berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan penelitian yuridis empiris maksudnya penelitian ini lebih ditekankan pada penelitian lapangan untuk

⁶ *Loc. cit.*

memperoleh data primer, akan tetapi penelitian ini terlebih dahulu dilakukan dengan memperhatikan data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan data primer yang dimaksud.

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan secara lisan kepada 2 (dua) orang atau lebih dan mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan dari mereka⁷. Wawancara dilakukan secara langsung dengan responden dan narasumber. Pengambilan sample untuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu jenis pengambilan sample yang dilakukan menggunakan pertimbangan penulis sendiri dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota-anggota sampel⁸. Tata cara ini diterapkan apabila peneliti benar-benar ingin menjamin bahwa unsur-unsur yang hendak ditelitinya masuk kedalam sampel yang ditarik⁹.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Yogyakarta

Pada saat PJN dicabut, ketentuan mengenai pengelolaan Protokol Notaris tidak lagi berada pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri, namun kewenangan tersebut beralih pada MPD. Pasal 63 ayat (5) UUJN menyebutkan bahwa : “Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahan berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.” Berdasarkan UUJN, maka Pengadilan Negeri Yogyakarta menyadari bahwa tugas dan wewenang Pengadilan Negeri untuk mengelola Protokol Notaris juga telah berakhir. Menurut keterangan Ketua Panitera Muda Hukum, Ibu Iman Listyawati, S.H., Protokol Notaris yang tersimpan di Pengadilan Negeri Yogyakarta diperkirakan mencapai ribuan

⁷ Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, 2007, *Metodologi Penelitian*, Bumi aksara, Jakarta, hlm. 83.

⁸ Maria. S. Sumardjono, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (sebuah Panduan Dasar)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 31.

⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 196.

Protokol, jika ingin dipindahkan dibutuhkan sekitar 4 (empat) truk baru akan selesai diangkut. Pada awal diundangkannya UUJN pihak Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengirimkan surat kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkaitan dengan agar segera dilakukan penyerahan Protokol Notaris yang tersimpan di Pengadilan Negeri Yogyakarta agar dapat diambil alih dan dikelola oleh Majelis Pengawasan Daerah, sesuai dengan ketentuan UUJN. Sampai saat ini, belum ada tanggapan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan penyerahan Protokol Notaris tersebut. Pada kenyataannya masyarakat terus mendatangi Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan mengajukan permohonan atas salinan akta tertentu dan secara fisik, minuta akta masih tersimpan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dengan alasan membantu masyarakat, maka Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta masih melayani masyarakat dengan mengeluarkan salinan akta demi memenuhi kepentingan masyarakat.

B. Hasil penelitian yang diperoleh dari MPD Kota Yogyakarta

Menurut keterangan Bapak Unan Pribadi selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum, yang salah satu tugasnya adalah menangani urusan-urusan Notaris seperti memfasilitasi MPD dan urusan yang berkaitan dengan pelantikan Notaris dan Bapak Haryanto selaku anggota MPD, pada awal terbentuknya MPD, Kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menunjuk Seketariat MPD Kota Yogyakarta di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1, namun hal itu tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan ruangan yang tersedia.

Pada tahun 2009, kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah mempunyai rencana dengan melakukan koordinasi dengan Badan Arsip Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, apakah Kantor Wilayah dimungkinkan mendapatkan tempat khusus untuk menyimpan Protokol Notaris yang masih tersimpan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat diambil dan kemudian ditempatkan di Kantor Badan Arsip Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah dilakukan rapat koordinasi, Badan Arsip

Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengalami kesulitan untuk menyediakan ruangan yang memadai untuk penyimpanan Protokol Notaris tersebut. Bersamaan dengan itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga mempunyai rencana untuk melakukan penyewaan gedung guna dijadikan sebagai kantor Seketariat MPD, agar semua aktifitas MPD dapat dilakukan di kantor seketariat tersebut antara lain rapat anggota, penyimpanan Protokol Notaris, kegiatan surat menyurat dan pengaduan masyarakat dapat disampaikan di kantor seketariat tersebut. Terkait dengan keterbatasan anggaran menyebabkan rencana itu belum dimungkinkan untuk dilaksanakan. MPD tidak hanya kesulitan dalam menyediakan tempat untuk penyimpanan peralihan Protokol Notaris, dana MPD untuk menjalankan tugasnya dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan seperti uang transportasi saja masih menjadi masalah. Selama ini tempat yang digunakan MPD Kota Yogyakarta untuk melakukan rapat anggota adalah di Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. MPD kota Yogyakarta menyadari bahwa berkaitan dengan pengelolaan Protokol Notaris ditinjau dari sisi hukum seharusnya sudah merupakan kewenangan dari MPD, namun secara fisik Protokol Notaris hingga saat ini masih tersimpan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hal ini disebabkan karena ketidaksiapan MPD untuk mengambil alih semua Protokol Notaris yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta karena keterbatasan anggaran untuk menyediakan tempat. Hal ini menyebabkan MPD kota Yogyakarta tidak pernah melakukan komunikasi kepada pihak Pengadilan Negeri Yogyakarta mengenai Protokol Notaris. MPD khawatir ketika Pengadilan Negeri Yogyakarta meminta kepada MPD untuk segera dilakukan pemindahan Protokol Notaris yang tersimpan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, MPD kota Yogyakarta belum siap untuk menerima semua Protokol Notaris tersebut. Dengan adanya Undang-Undang Jabatan Notaris, seharusnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyediakan anggaran yang memadai untuk mendukung berjalannya Undang-Undang Jabatan Notaris itu sendiri. Akan tetapi pada kenyataannya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak mempersiapkan anggaran tersebut sehingga Majelis Pengawasan Wilayah (MPW) dan MPD yang berada di lapangan tidak

dapat berbuat banyak. Anggaran untuk MPD pada saat ini sekitar Rp.120.000.000 (seratus duapuluh juta rupiah) per tahun, dana sebesar itu dibagi kepada 5 (lima) MPD dan 1 (satu) MPW. Diperkirakan gaji untuk ketua sekitar Rp.260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan sedangkan untuk anggota sekitar Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan. Dana itu dianggap sangat minim sekali, demikian MPD tidak mempunyai dana lebih untuk menyediakan tempat penyimpanan Protokol Notaris¹⁰. Berdasarkan Keterangan dari Bapak Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas, SH, selaku Ketua MPD Kota Yogyakarta, sejak berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, MPD belum pernah melakukan peralihan Protokol Notaris dari Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada MPD Kota Yogyakarta, hal ini terjadi karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh MPD Kota Yogyakarta, sehingga tugas dan wewenang MPD dalam hal pengelolaan Protokol Notaris belum dapat dilaksanakan. Keterangan lebih lanjut yang diberikan oleh Bapak Firdaus, seharusnya ada Peraturan Pelaksanaan yang dapat mendukung jalannya Undang-Undang Jabatan Notaris¹¹.

Wawancara juga dilakukan kepada Bapak Bimo Seno Sanjaya, S.H., selaku anggota MPD Kota Yogyakarta, keterangan yang diberikan oleh Bapak Bimo adalah sama dengan responden sebelumnya, kendala yang paling utama adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh MPD Kota Yogyakarta. Beliau juga sebagai pemegang Protokol Notaris dari Notaris lain yaitu Notaris Makruf, S.H. yang usianya telah lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun. Namun hingga saat ini masih tersimpan di Kantor Bapak Bimo, karena MPD sendiri belum ada tempat untuk itu. Hak Notaris penerima Protokol adalah mengeluarkan groose akta, salinan akta dan kutipan akta serta menunjukkan minuta akta kepada pihak berwajib sebagai bukti di pengadilan dengan rekomendasi dari MPD. Kewajiban Notaris penerima peralihan Protokol adalah mengadministrasikan (mendaftar), menyimpan, merawat protokol yang diterimanya dengan sebaik-baiknya, memberi fasilitas lemari untuk menyimpan. Larangan bagi Notaris penerima Protokol

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Unan Pribadi, S.H.dan Bapak Haryanto, S.H., Juli 2010, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yogyakarta.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas, S.H., Juni 2010, Kantor Jl. Taman siswa, Yogyakarta.

adalah tidak merawat dengan baik atas Protokol yang diterimanya, menghilangkan Protokol baik itu sebagian ataupun seluruhnya, merubah salinan minuta akta karena adanya konspirasi dengan salah satu pihak dengan tujuan menguntungkan kepentingan salah satu pihak dan membocorkan rahasia akta. Berkaitan dengan salinan akta yang dilakukan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, Bapak Bimo menyatakan bahwa bukan MPD tidak mau mengeluarkan salinan akta atas minuta akta, namun berhubungan dengan fisik Protokol Notaris yang masih tersimpan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, bagaimana MPD mau mengeluarkan salinan akta? Apa yang mau disalin? Keterangan lebih lanjut bahwa peralihan kewenangan ini memang menjadi masalah dalam praktek, maka Bapak Bimo akan melakukan rapat anggota MPD untuk membicarakan hal tersebut¹².

Sejak berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan terbentuknya MPD Kota Yogyakarta belum pernah melakukan komunikasi ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga MPD tidak mengetahui bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta masih mengeluarkan salinan akta sampai dengan memfotokopi minuta akta. MPD Kota Yogyakarta baik itu Bapak Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas selaku Ketua, Bapak Bimo Seno Sanjaya dan Bapak Haryanto selaku anggota, mengetahui hal tersebut justru dari Penulis yang telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pada akhir proses wawancara dengan Bapak Unan Pribadi mengatakan bahwa persoalan peralihan Protokol Notaris dari Pengadilan Negeri kepada MPD tidak hanya terjadi di Kota Yogyakarta saja, di Kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Gunung Kidul juga belum dialihkan. Hanya Kabupaten Sleman saja yang sudah terjadi peralihan Protokol Notaris dari Pengadilan Negeri ke MPD, kemudian Bapak Unan Pribadi dan Bapak Haryanto mengatakan bahwa persoalan salinan akta maupun fotokopi minuta akta yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta merupakan suatu kesalahan dan akan disampaikan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pusat agar segera mendapatkan penyelesaian terhadap masalah peralihan Protokol Notaris tersebut.

¹²Hasil wawancara dengan Bapak Bimo Seno Sanjaya, S.H., Juli 2009, Kantor Jl. Letjen Suprpto, Yogyakarta.

Wawancara juga dilakukan terhadap Ibu Dwi Haryati, S.H., M.Hum, selaku MPD dari unsur akademisi. Beliau sependapat dengan responden sebelumnya mengenai keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh MPD Kota Yogyakarta, kemudian beliau berpendapat bahwa¹³:

1. MPD hanya bertugas untuk mengawasi Notaris, mengenai penyimpanan Protokol Notaris dari Notaris lain yang usianya lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, bukan merupakan tugas dari MPD, karena baik di dalam UUJN maupun Peraturan Menteri tidak ditemukan ketentuan mengenai MPD ditugaskan untuk menyimpan Protokol Notaris. Berbeda dengan dahulu dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) memang disebutkan dengan jelas bahwa untuk Protokol Notaris dari Notaris lain yang telah berusia 15 (lima belas) tahun atau lebih diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri, dan Panitera Pengadilan Negeri ditugaskan untuk menyimpan semua Protokol Notaris yang mereka ambil alih, mereka berwenang dan wajib melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan Protokol Notaris sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Notaris terhadap Protokolnya.
 2. Tugas MPD hanya sebatas menunjuk Notaris lain sebagai penerima Protokol Notaris. Dalam praktek, Notaris yang akan mengalihkan Protokol sudah mempunyai calon Notaris yang akan menerima Protokol Notarisnya.
 3. Apabila memang harus dialihkan Protokol Notaris yang terlanjur ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka tugas dari MPD hanya menunjuk Notaris lain yang akan menerima Protokol.
 4. Mengenai setelah diundangkannya UUJN, salinan akta yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah tidak sah namun merupakan tindakan yang dapat dimaklumi dalam mengisi kekosongan hukum.
- Setelah dicabutnya PJN, Pengadilan Negeri menyadari bahwa mereka

¹³Hasil wawancara dengan Ibu Dwi Haryati, S.H., M.Hum., Agustus 2010, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

sudah tidak berwenang atas Protokol Notaris. Namun dalam UUJN maupun Peraturan Menteri juga tidak mengatur ketentuan mengenai peralihan Protokol Notaris dari Pengadilan Negeri ke MPD ataupun tugas MPD untuk menyimpan Protokol Notaris.

5. Mengenai fotokopi Minuta Akta yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta juga merupakan tindakan yang dapat dimaklumi dengan menghemat waktu dan tenaga agar menjadi lebih efisien maka dapat memanfaatkan teknologi fotokopi yang ada.

C. Pembahasan

1. Kewenangan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengeluarkan salinan akta setelah berlakunya UUJN

Ketika membicarakan masalah wenang atau tidak, tentu harus dilihat dasar hukum yang memberikan kewenangan tersebut. Sebelum UUJN diundangkan, peraturan yang mengatur tentang jabatan Notaris adalah PJN. PJN diundangkan pada tanggal 26 Januari 1860 (Stb. no.3) dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. Pada Pasal 66 PJN memberikan wewenang kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri untuk mengelola Protokol Notaris dari Notaris lain yang telah berusia 15 (lima belas) tahun atau lebih. Bunyi dari Pasal 66 PJN adalah sebagai berikut:

“Notaris yang baru diangkat itu wajib, baik sendiri maupun oleh kuasanya secara tertulis, untuk dalam waktu tiga bulan setelah ia memangku jabatannya, membawa ke kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya Notaris mempunyai tempat kedudukan, minuta, daftar dan repertorium, sebegitu jauh itu pada tanggal satu Januari dari tahun, pada waktu mana terjadi pengambi-alihannya, berumur lebih dari limabelas tahun.

Tentang pembawaan itu dibuat berita-acara dan ditandatangani oleh Notaris dan Panitera; dari berita-acara ini diberikan satu helai kepada setiap penanda tangan. Para Panitera Pengadilan Negeri ditugaskan untuk menyimpan semua minuta, daftar dan repertorium yang mereka ambil alih. Mereka berwenang dan wajib melakukan segala sesuatu mengenai itu, sebagaimana Notaris berwenang dan wajib melakukannya terhadap minuta, daftar dan repertorium mereka.”

Setelah diundangkan UUJN, dapat dilihat pada Bab XIII Ketentuan Penutup Pasal 91 angka 1 bahwa peraturan perundang-undangan dibawah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

1. *Reglemen Op Het Ambt in Indonesie (Stb.1860:3)*, sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101;
2. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101; Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang sumpah/janji Jabatan Notaris.

PJN telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah tidak berwenang atas pengelolaan Protokol Notaris termasuk dalam hal mengeluarkan salinan akta. Keterangan yang diberikan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada awal diundangkannya UUJN pihak Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengirimkan surat kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkaitan dengan agar segera melakukan penyerahan Protokol Notaris yang tersimpan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat diambil alih dan dikelola oleh MPD, sesuai dengan ketentuan UUJN. Namun, hingga saat ini, belum ada tanggapan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan peralihan Protokol Notaris tersebut. Sehubungan dengan banyaknya permohonan atas salinan akta oleh masyarakat, maka Kepaniteraan Pengadilan Negeri masih melayani masyarakat dengan mengabulkan permohonan atas salinan akta, sehingga salinan akta yang dikeluarkan hanya bersifat membantu masyarakat yang membutuhkan.

2. Keabsahan salinan akta yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta

Keabsahan salinan akta yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat dijelaskan dengan melihat pada peraturan yang memberikan kewenangan tersebut. Sama halnya dalam menjawab pertanyaan sebelumnya saat PJN dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, maka kewenangan Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk menyimpan dan mengelola Protokol Notaris telah berakhir. Dengan berakhirnya kewenangan Pengadilan Negeri yang diberikan oleh PJN, maka semua produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri terhadap Protokol Notaris adalah tidak sah.

Pengertian sah dalam Kamus Hukum adalah “dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku; segala sesuatu yang diakui kebenarannya; pasti otentik”, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan sah adalah “dilakukan menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku”. Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dengan dicabutnya PJN dan dinyatakan tidak berlaku oleh UUJN maka telah jelas bahwa Kepaniteraan Pengadilan Negeri sudah tidak berwenang atas pengelolaan Protokol Notaris termasuk mengeluarkan salinan akta.

Setelah UUJN, salinan akta yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, dinyatakan tidak sah menurut hukum. Adapun salinan akta yang telah dikeluarkan dinyatakan batal demi hukum. Hal ini juga dibenarkan oleh responden dan narasumber bahwa Salinan yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah tidak sah, namun merupakan tindakan yang dapat dimaklumi, mengingat secara fisik Protokol Notaris masih tersimpan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

3. Tugas dan wewenang MPD Kota Yogyakarta berkaitan dengan pengelolaan Protokol Notaris

Tugas dan wewenang MPD yang berkaitan dengan pengelolaan Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada saat penyerahan berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih tidak diatur secara jelas dalam UUJN. Pasal 63 ayat (5) UUJN

menyebutkan bahwa: “Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahan berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.”

Pasal 70 huruf e UUJN memberikan kewenangan kepada MPD untuk “Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.”

Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH- 06.AH.02.10 Tahun 2009 tentang Sekretariat Majelis Pengawas Notaris menentukan “sekretariat MPD dilaksanakan secara fungsional oleh Lembaga Pemasyarakatan.” Pasal 6 menentukan Tugas dari sekretariat MPD adalah untuk menyelenggarakan fungsi, antara lain:

- a. pengelolaan surat masuk dan surat keluar;
- b. penerimaan laporan masyarakat terhadap Notaris;
- c. pembentukan Majelis Pemeriksa Daerah dan Tim Pemeriksa Protokol Notaris;
- d. penyiapan persidangan Majelis Pemeriksa Daerah;
- e. penyiapan Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah;
- f. penyimpanan Protokol Notaris berusia 25 tahun atau lebih;
- g. penyiapan penunjukan pemegang Protokol Notaris;
- h. penyiapan pemanggilan pelapor dan terlapor;
- i. pelaksanaan pemberian pelayanan administrasi kenotariatan;
- j. penyampaian Berita Acara Pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Wilayah;
- k. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
- l. penyiapan pelantikan anggota Majelis Pengawas Notaris;
- m. penyiapan penyusunan laporan berkala kepada Majelis Pengawas Wilayah; dan
- n. penyiapan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Majelis.

Peraturan Menteri tersebut mengatur dengan jelas bahwa sekretariat MPD ada pada lembaga pemasyarakatan, dan salah satu tugas dari sekretariat MPD adalah digunakan sebagai tempat penyimpanan Protokol Notaris yang telah

berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih. Peraturan Menteri ini telah memberikan kejelasan bahwa salah satu tugas dari MPD adalah mengelola Protokol Notaris yang telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih. Oleh karena itu, apabila ada masyarakat yang mengajukan permohonan atas salinan akta, seharusnya sudah bukan kepada Kepaniteran Pengadilan Negeri Yogyakarta tetap mengajukan permohonan ke sekretariat MPD yang berada di lembaga pemasyarakatan.

V. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sejak diundangkan UUN tahun 2004 hingga sekarang tahun 2010, belum terjadi peralihan fisik atas Protokol Notaris dari Pengadilan Negeri Yogyakarta ke MPD Kota Yogyakarta, sehingga Pengadilan Negeri Yogyakarta masih menyimpan ribuan Protokol Notaris. Sehubungan dengan banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan atas salinan akta tertentu yang tersimpan di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta dan sifat pasif dari MPD sendiri, atas dasar membantu dan demi kepentingan masyarakat, maka Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta masih melayani permohonan masyarakat dengan tetap mengeluarkan salinan akta yang dimaksud.
2. PJN yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk mengelola Protokol Notaris, dengan dicabutnya PJN dan dinyatakan tidak berlaku, maka kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan salinan akta juga telah berakhir, maka salinan akta yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah tidak sah, karena telah mengeluarkan produk hukum yang tidak berada dalam kewenangannya. Berdasarkan hasil penelitian, ada MPD yang berpendapat bahwa tindakan ini dapat dimaklumi mengingat secara fisik Protokol Notaris masih tersimpan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

3. Tugas dan wewenang MPD mengenai pengelolaan Protokol Notaris telah diatur secara jelas setelah ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-06.AH.02.10 Tahun 2009 tentang Sekretariat Majelis Pengawas Notaris. Sehubungan dengan keterbatasan sarana dan prasarana MPD kota Yogyakarta dalam menyediakan tempat untuk penyimpanan Protokol Notaris dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, menyebabkan Protokol Notaris masih tersimpan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Demikian MPD Kota Yogyakarta belum dapat menjalankan tugas dan wewenangnya berkaitan dengan pengelolaan Protokol Notaris.

B. Saran

1. MPD Kota Yogyakarta segera menjalin komunikasi dengan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta agar menghentikan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan Protokol Notaris.
2. MPD segera melaporkan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas masalah dikeluarkan salinan akta dan tindakan mengfotokopi Minuta Akta oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, supaya mendapatkan solusi penyelesaiannya.
3. Diharapkan pihak Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk lebih berhati-hati dan selektif dalam bertindak. Kesalahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang UUJN. Hal ini diungkapkan oleh Penulis dikarenakan pada saat melakukan penelitian, pihak Pengadilan Negeri Yogyakarta meminta agar Penulis menyumbangkan sebuah UUJN kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta supaya dapat dipelajari lebih lanjut.
4. Mengingat Protokol Notaris yang tidak terurus di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan akan semakin bertambahnya jumlah. Untuk Protokol Notaris yang telah gugur hak menuntut, disimpan dalam bentuk *soft copy* dapat menjadi solusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi IV)*, Rineka Cipta, Jakarta.

Narbuko, Cholid, H. Abu Achmadi, 2007, *Metodologi Penelitian*, Bumi aksara, Jakarta.

Notodisoerjo, Soegondo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Sumardjono, Maria, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (sebuah Panduan Dasar)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Tobing, Lumbang, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2004

Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH=06.AH.02-10 Tahun 2009 tentang Sekretariat Majelis Pengawas Notaris